

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diukur melalui indikator kinerja daerah. Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setiap tahunnya hingga akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran dan indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan dapat dicapai.

Target capaian indikator kinerja daerah yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1 Realisasi dan Target Capaian Kinerja

SASARAN		INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN 2018	TARGET 2019	TARGET RPJMD 2020	TARGET RPKD 2020
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	10.47 Tahun*	10,49 Tahun	10,51 Tahun	10,51 Tahun
		Harapan Lama Sekolah	13.93 Tahun*	14,73 Tahun	14.93 Tahun	14.93 Tahun
2	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat berkelanjutan	Usia Harapan Hidup	73.97 Tahun*	73,99 Tahun	74 Tahun	74 Tahun
3	Menurunnya Jumlah Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9.52 %	5,05 %	4.85 %	4.85 %
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64.33	64,09	64.5	64.5
4	Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia	78.73*	79,13	79.53	79.53
		Tingkat Kemiskinan	2.64	2,32	2.31	2.31
		Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89.74	92	92	92
5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59.55	59,82	60,14	60,14
6	Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Livable City Index	81.3	73,50	74	82,3

7	Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar	80.35	77	78	82,35
8	Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat	Penurunan indeks Gini Ratio	0.32*	0,32	0,31	0,31
		Peningkatan PDRB perkapita	Rp. 142.35 (Juta)	151,15 (Juta)	Rp 124,63 (Juta)	Rp. 155,36 (Juta)
9	Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatkan nilai PDRB Non Migas	Rp. 67.46 (Triliun)*	Rp. 48,65 (Triliun)	Rp 37,48 (Triliun)	Rp 57,13 (Triliun)
10	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Opini Laporan Keuangan	WTP*	WTP	WTP	WTP
		Indeks Persepsi Korupsi	6.87	6,75	6,8	6,8
		Survey Kepuasan Masyarakat	78.78	79,76	80,16	80,16
		Nilai Evaluasi LAKIP	68.13 (B)	71,00 (BB)	BB	BB
		Penilaian Kepatuhan	83.19	83,19	75	83,19
		Indeks Profesionalitas ASN	92.58	85	86	93,00

Adapun Indikator Kinerja Utama yang sudah tercapai seperti dimaksud pada tabel diuraikan sebagaimana berikut ini:

1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Target Indikator Kinerja Utama Rata-rata lama sekolah sebesar 10,47 sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 10,58*. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja Indikator Kinerja Utama sebesar 101,05% artinya capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pendidikan” di Kota Balikpapan dengan Indikator Kinerja Utama Rata-rata lama sekolah“ TERCAPAI” pada tahun 2018. Ketercapaian Indikator Kinerja Utama Rata-rata Lama Sekolah sebesar 101,05% menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada tahun 2018, keberhasilan tersebut ditinjau dari jumlah tahun yang digunakan masyarakat dalam menjalani pendidikan formal dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi S2/S3. Berdasarkan Keberhasilan capaian realisasi Rata-rata Lama Sekolah tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui pengembangan dan peningkatan kualitas mutu pendidikan secara berkelanjutan.

2. **Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)**

Target IKU Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 13,93 sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai Realisasi sebesar 14,23*. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja Indikator Kinerja Utama sebesar 102,15% artinya capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pendidikan” di Kota Balikpapan dengan Indikator Kinerja Utama Angka Harapan Lama Sekolah “TERCAPAI” pada tahun 2018.

Capaian Indikator Kinerja Utama Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 102,15% menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Balikpapan bersama perangkatnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada tahun 2018, keberhasilan tersebut ditinjau dari waktu tempuh pendidikan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat Kota Balikpapan untuk menerima layanan pendidikan pada jenjang tertentu yaitu pendidikan tingkat dasar, dan lanjutan menengah pertama.

Berdasarkan capaian tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui pengembangan dan peningkatan kualitas mutu pendidikan secara berkelanjutan.

3. **Angka Harapan Hidup (AHH)**

Target Indikator Kinerja Utama Angka Harapan Hidup sebesar 73,97 sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai Realisasi sebesar 73,98*. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 100,01% artinya capaian sasaran strategis “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Berkelanjutan” di Kota Balikpapan dengan Indikator Kinerja Utama Angka Harapan Hidup “TERCAPAI” pada tahun 2018.

Capaian IKU Angka Harapan Hidup sebesar 100,01% menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota Balikpapan secara berkelanjutan pada tahun 2018, keberhasilan tersebut ditinjau dari lamanya usia penduduk Kota Balikpapan terhitung sejak lahir. Terkait dengan tingkat capaian indikator sasaran tersebut maka asumsi perilaku hidup sehat masyarakat telah dilaksanakan secara baik.

Berdasarkan capaian tersebut, maka Pemerintah Kota bersama perangkat daerah perlu meningkatkan kinerjanya untuk terus mengembangkan dan berinovasi dengan fokus pentingnya hidup sehat dalam diri, berkeluarga, dan masyarakat. Selain hal tersebut perlu tersedianya informasi, sosialisasi, dan layanan kesehatan secara murah dan dapat dijangkau untuk semua kalangan masyarakat di Kota Balikpapan.

4. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPTk)**

Target Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,30% sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 9,52%. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 55,67% artinya capaian sasaran strategis “Menurunnya Jumlah Pengangguran” di Kota Balikpapan dengan Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka “TIDAK TERCAPAI” pada tahun 2018.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 55,67% merupakan ketidakkeberhasilan Pemerintah Kota dalam memecahkan permasalahan pada urusan ketenagakerjaan di kota Balikpapan. Hal ini terjadi karena:

- a. Jumlah pengangguran berbanding terbalik terhadap jumlah angkatan kerja. Artinya bahwa total pencari kerja lebih besar dari angkatan kerja pada tahun 2018. Hal ini dikarenakan penyerapan tenaga kerja sangat rendah pada tahun sebelumnya, sehingga menambah jumlah pencari kerja pada tahun 2018;
- b. Jumlah ketersediaan lapangan kerja yang tidak memadai atau dapat diasumsikan adanya penyempitan ruang penyerapan tenaga kerjadanhal iniberdampak permintaan tenaga kerja menjadi lebih sedikit;
- c. Jumlah pemutusan hubungan kerja meningkat sangat signifikan dalam 3 tahun terakhir dan masih terjadi sampai dengan akhir tahun 2018. Besarnya pemutusan hubungan kerja terjadi pada sektor migas dan pertambangan, sehingga jumlah pemutusan hubungan kerja tersebut memberikan sumbangan pada tingkat pengangguran terbuka;
- d. Ketersediaan angkatan kerja yang kurang dapat memenuhi permintaan bursa tenaga kerja baik lokal maupun non lokal. Sedangkan disisi lain jumlah angkatan kerja yang berasal dari luar Kota Balikpapan lebih mendominasi dalam pemenuhan permintaan lapangan kerja yang berada di Kota Balikpapan;
- e. Permasalahan belum adanya arah kebijakan, metode dan ukuran yang memadai untuk menyelesaikan pengangguran terbuka.

Berdasarkan uraian penyebab terjadinya penurunan kinerja pada Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka, maka Pemerintah Kota berupaya:

1. menyediakan potensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor lapangan kerja yang berada di Kota Balikpapan serta memberdayakan kewirausahaan di daerah;
2. mempercepat pembangunan dan pengembangan kawasan potensi investasi serta membangun minat investor untuk menanamkan modalnya;

3. membangun arah pendidikan dan penyediaan balai latihan kerja yang memadai serta dapat memenuhi spesifikasi yang searah terhadap kebutuhan lapangan kerja;
4. menurunkan tingkat dominasi daya saing tenaga kerja dari luar daerah;
5. melaksanakan reviu dan pemuktahiran data ketenagakerjaan, pengendalian dan evaluasi terhadap arah kebijakan, metode dan ukuran target indikator untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

5. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Target Indikator Kinerja Utama Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 63,68% sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 64,33%. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 101,02% artinya capaian sasaran strategis “Menurunnya Jumlah Pengangguran” di Kota Balikpapan dengan Indikator Kinerja Utama Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja “TERCAPAI” pada tahun 2018.

Capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 101,02% merupakan *add value* bagi Pemerintah Kota sehubungan dengan tersedianya potensi angkatan kerja usia produktif, hal ini berarti Pemerintah Kota Balikpapan telah memasuki bonus demografi. Bonus demografi adalah bonus atau peluang (*window of opportunity*) yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Bonus demografi tersebut perlu dimanfaatkan secara baik dan dioptimalkan untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Namun disisi lain apabila bonus demografi tersebut tidak dimanfaatkan secara baik maka akan menimbulkan peluang efek negatif yaitu banyaknya usia produktif yang tidak memiliki pendidikan serta tidak memiliki pekerjaan serta kurangnya kesehatan dan juga gizi yang cukup.

Tidak menutup kemungkinan, tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Selain itu masyarakat juga harus mendukung program Keluarga Berencana.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Pemerintah Kota perlu menindaklanjuti dan mengupayakan perkuatan yang berfokus pada: a) Investasi SDM (Sumber Daya Manusia) Berkualitas, b) Meningkatkan Pendidikan, c) Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja, d) Menyediakan Lapangan Kerja yang Memadai, e) Memperkuat Investasi dibidang Kesehatan, f) Meningkatkan Produksi Pangan dan f) Melaksanakan Program Keluarga Berencana (KB) sebagai gerakan nasional.

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Target IKU IPM sebesar 78,73 sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 79,71. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU perbandingan antara target dan realisasi sebesar 101,24%. Sejalan dengan capaian kinerja IPM diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2018.

Capaian IKU IPM sebesar 101,24% menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil membangun kualitas hidup manusia khususnya penduduk kota Balikpapan tahun 2018. IPM merupakan komposit dari kinerja bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan, oleh sebab itu nilai IPM merupakan keberhasilan kualitas hidup manusia yang dicapai penduduk Kota Balikpapan pada umumnya telah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Upaya tindak lanjut Pemerintah Kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU IPM pada tahun 2018 adalah:

- a. memberikan akses layanan yang mampu memberikan layanan seluas-luasnya ditinjau dari pendapatan, kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat Kota Balikpapan;
- b. meningkatkan akses layanan yang siap, murah, dan cepat untuk pendapatan, kesehatan, dan pendidikan;
- c. melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap berbagai sumber hambatan dalam meningkatkan layanan perangkat daerah pada masyarakat Kota Balikpapan.

7. Tingkat Kemiskinan (TKm)

Target IKU Tingkat Kemiskinan sebesar 2,33% sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 2,64%. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Tingkat Kemiskinan antara target dan realisasi sebesar 88,26%. Sejalan dengan capaian kinerja Tingkat Kemiskinan diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan” di Kota Balikpapan dinyatakan “TIDAK TERCAPAI” pada tahun 2018. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.

Capaian IKU Tingkat Kemiskinan sebesar 88,26% menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Balikpapan kurang berhasil dalam menekan Tingkat Kemiskinan di Kota Balikpapan sesuai dengan target Tingkat Kemiskinan sebesar 2,33% pada tahun 2018. Berdasarkan data dari BPS kota Balikpapan jumlah penduduk miskin Balikpapan sampai akhir 2017 mencapai 17.680 jiwa dengan Tingkat Kemiskinan sebesar 2,82%.

Kondisi sampai dengan akhir tahun 2018 jumlah penduduk miskin mencapai 17.008 jiwa dengan Tingkat Kemiskinan mencapai 2,64% artinya target kinerja Tingkat Kemiskinan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,31%. Tingkat Kemiskinan di Kota Balikpapan disumbang oleh faktor jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK) sampai akhir tahun 2018.

Kondisi nilai Tingkat Kemiskinan tidak selalu berkorelasi dengan Tingkat Pengganguran Terbuka, artinya Tkm tidak berarti bahwa Tingkat Pengganguran Terbuka juga harus rendah. Penjelasannya adalah bahwa para pekerja terdiri atas kelas-kelas penghasilan yang diterimanya, sehingga kondisi ekonominya bisa di atas Garis Kemiskinan atau di bawah Garis Kemiskinan, tergantung penghasilan yang diperolehnya. Dalam hal ini penduduk Kota Balikpapan rendah TKm-nya yang berarti bahwa sebagian besar kondisi ekonomi penduduk Balikpapan di atas Garis Kemiskinan.

Adapun kondisi Tingkat Pengganguran Terbuka di Balikpapan masih tinggi, terutama pasca Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang cukup tinggi disebabkan oleh para pencari kerja terutama eks PHK masih memiliki kemampuan ekonomi yang relatif cukup baik (di atas Garis Kemiskinan).

Upaya tindak lanjut Pemerintah Kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU TKm pada tahun 2018 adalah menekan laju pertumbuhan Tingkat Pengganguran Terbuka (TPTk), mengatasi tingkat ketimpangan pemerataan pendapatan penduduk atau rasio gini di Kota Balikpapan, Mengendalikan inflasi.

8. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Target IKU Indeks Pembangunan Gender sebesar 91,00 sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 91,46. Realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Indeks Pembangunan Gender antara target dan realisasi sebesar 100,51%. Sejalan dengan capaian kinerja IPG diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2018.

Capaian IKU Indeks Pembangunan Gender sebesar 100,51% menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil dalam meningkatkan kemampuan dasar pembangunan manusia ditinjau dari ketimpangan gender di Kota Balikpapan sesuai dengan target angka IPG sebesar 91,00 pada tahun 2018.

Bahwa berdasarkan data dari BPS kota Balikpapan angka indeks capaian IPG Kota Balikpapan pada tahun 2015 mencapai 89,97, tahun 2016 angka indeks capai sebesar 90,11 dan capaian angka Indeks Pembangunan

Gender tahun 2017 adalah 89,74. Berdasarkan realisasi tersebut capaian IPG Kota Balikpapan tahun 2018 diproyeksikan sebesar 91,46*. Sejalan dengan capaian realisasi kinerja Indeks Pembangunan Gender tahun 2018 (angka proyeksi) tersebut menunjukkan kesenjangan antar gender berpredikat sangat rendah dalam pembangunan atau adanya kesetaraan gender dalam pembangunan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi disegala bidang.

Upaya dan tindak lanjut Pemerintah Kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU Indeks Pembangunan Gender pada tahun 2018 adalah meningkatkan pemberian pelatihan bagi perempuan, kesempatan berusaha dan bekerja yang seluas-luasnya bagi perempuan, menurunkan tingkat diskriminasi gender, meminimalisasi tingkat kekerasan bagi perempuan dalam rumah tangga, sosialisasi dan kampanye pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan melalui organisasi-organisasi wanita serta tersedianya porsi kursi untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk perempuan.

9. **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

Target IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 59,50 sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 59,58. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup antara target dan realisasi sebesar 100,13%. Sejalan dengan capaian kinerja IKLH diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2018. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.

Capaian IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 100,13% menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Balikpapan yang melampaui dari target angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2018.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dihitung berdasarkan penjumlahan dari Indeks Pencemaran Air (IPA) dengan bobot 30%, Indeks Pencemaran Udara (IPU) dengan bobot 30%, dan Indeks Tutupan Lahan (ITH) dengan bobot 40%. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2015 sebesar 63,88; tahun 2016 sebesar 62,45; dan tahun 2017 sebesar 61,25. Sehubungan dengan capaian realisasi kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tersebut menunjukkan adanya penurunan sebesar 1,67 poin pada tahun 2018 dibandingkan tahun capaian 2017. Penurunan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tersebut menandakan kualitas lingkungan hidup tahun 2018 mengarah pada kondisi lingkungan hidup yang kurang baik. Penurunan kualitas lingkungan hidup dipengaruhi atas kualitas air, udara dan tutupan hutan/lahan yang mengalami tekanan negatif oleh

aktivitas masyarakat dan usaha di Kota Balikpapan. Pencemaran air berasal dari limbah rumah tangga, limbah kegiatan usaha (kantor, restoran, warung, hotel dll) dan limbah B3 pencemaran udara berasal dari emisi gas buang kendaraan bermotor dan pengupasan lahan yang kurang terkendali.

Upaya dan tindak lanjut Pemerintah Kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2018 adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui perlindungan, pengawasan dan pengendalian lingkungan, mencegah pengupasan lahan, melakukan rehabilitasi lingkungan, sosialisasi peran serta masyarakat dan stakeholder dalam pembangunan lingkungan, pengembangan kawasan hijau dan kegiatan-kegiatan pendukung yang berorientasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

10. ***Livable City Index (LCI)***

Target IKU *Livable City Index* sebesar 73,00 sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 81,30. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU *Livable City Index* antara target dan realisasi sebesar 111,30%. Sejalan dengan capaian kinerja *Livable City Index* diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2018. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.

Capaian IKU *Livable City Index* sebesar 111,30% menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil dalam meningkatkan kenyamanan yang didasarkan atas persepsi masyarakat di Kota Balikpapan yang melampaui dari target angka *Livable City Index* sebesar 73,00 pada tahun 2018. Upaya dan tindak lanjut Pemerintah Kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU *Livable City Index* pada tahun 2018 adalah berfokus dalam memberikan nilai tambah yang berkelanjutan terhadap layanan peningkatan ekonomi masyarakat, layanan fasilitas kesehatan, layanan kebersihan kota, layanan ketersediaan akses jalan dan alat transportasi kota, dan layanan tata kelola kota.

11. **Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)**

Target IKU Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur sebesar 76,00 sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 80,35. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur antara target dan realisasi sebesar 105,72%. Sejalan dengan capaian kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2018.

Capaian IKU Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur sebesar 105,72% menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil dalam memenuhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur di Kota Balikpapan yang melampaui dari target angka Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur sebesar 76,00 pada tahun 2018. Angka capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur tahun 2018 diukur berdasarkan kepuasan masyarakat Kota Balikpapan pada sektor infrastruktur yang meliputi:

1. Penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas;
2. Penyediaan transportasi (Darat dan ASDP, Laut, dan Udara);
3. Penyediaan infrastruktur air bersih;
4. Penyediaan infrastruktur Irigasi (pertanian dan air baku);
5. Penyediaan infrastruktur perumahan.

Upaya dan tindak lanjut Pemerintah Kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur pada tahun 2018 adalah meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan sektor infrastruktur melalui pembangunan jalan dan jembatan, pengelolaan dan penyediaan transportasi darat yang murah, layanan keamanan dan kenyamanan pengguna transportasi ASDP, Laut dan Udara, memperluas pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat, peningkatan prasarana irigasi untuk pertanian dan air baku serta menurunkan *backlog* perumahan.

12. Gini Ratio (GR)

Target IKU Gini Ratio sebesar 0,33 sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 0,31. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Gini Ratio antara target dan realisasi sebesar 106,45%. Sejalan dengan capaian kinerja Gini Ratio diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2018.

Berdasarkan capaian IKU tersebut, untuk mengukur ketimpangan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Angka koefisien gini Ratio Kota Balikpapan dari selama periode 2008 – 2014 mengalami fluktuatif berdasarkan ukuran koefisien Gini Ratio maka Kota Balikpapan berada di ketimpangan sedang pada tahun 2010 yaitu sebesar 0,33 dan tahun 2011-2014 di bawah 0,31 yang disebut menuju ketimpangan rendah, yang berarti bahwa proses pertumbuhan ekonomi telah dibarengi dengan pemerataan pendapatan.

Pada tahun 2018, berdasarkan data dari BPS Kota Balikpapan angka indeks capaian Gini Ratio Kota Balikpapan mencapai 0,31. Angka capaian tersebut menunjukkan ketimpangan pada taraf rendah, dimana pertumbuhan ekonomi telah diikuti dengan pemerataan pendapatan.

Upaya dan tindak lanjut Pemerintah Kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU Gini Ratio pada tahun 2018 adalah:

- a. pengendalian tingkat kemiskinan dan distribusi bantuan sosial;
- b. menurunkan ketimpangan kekayaan. Selama ini, pendapatan pajak penghasilan masih didominasi oleh kalangan pekerja;
- c. menciptakan lapangan kerja baru;
- d. menciptakan wira usaha secara missal.

13. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita**

Target IKU Produk Domestik Regional Bruto Perkapita sebesar Rp.143,33 Juta sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar Rp.142,35 Juta. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Produk Domestik Regional Bruto Perkapita antara target dan realisasi sebesar 99,32%. Sejalan dengan capaian kinerja Produk Domestik Regional Bruto Perkapita diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat” di Kota Balikpapan dinyatakan “TIDAK TERCAPAI” pada tahun 2018.

Permasalahan tidak tercapainya IKU Produk Domestik Regional Bruto Perkapita dikarenakan oleh optimisnya penentuan target capaian tahun 2018 yang didasarkan atas proyeksi yang dilakukan dengan asumsi membaik, namun Produk Domestik Regional Bruto Perkapita masih mengalami kontraksi negative pada sejumlah sektor produk sebagai sumber pendapatan.

Upaya dan tindak lanjut Pemerintah Kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU Produk Domestik Regional Bruto Perkapita pada tahun 2018 adalah:

- a. meningkatkan pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam yang tersedia. Pengembangan yang dilaksanakan untuk mendongkrak Produk Domestik Regional Bruto Perkapita dengan meningkatkan usaha sentra industri kecil hasil pertanian dan kelautan;
- b. mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan pendidikan sumber daya manusia baik formal maupun informal;
- c. meningkatkan pengelolaan sektor perdagangan dan jasa;
- d. meningkatkan daya serap dan menumbuhkan lapangan pekerjaan untuk pencaker lokal.

14. **Produk Domestik Regional Bruto Non Migas**

Target IKU Produk Domestik Regional Bruto Non Migas sebesar Rp.67,46 Triliun sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar Rp.67,46Triliun. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Produk Domestik Regional Bruto Non Migas antara target dan realisasi sebesar 100%. Sejalan dengan capaian kinerja Produk Domestik Regional Bruto Non Migas diartikan bahwa capaian sasaran

strategis “Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2018.

Upaya tindak lanjut yang disarankan untuk peningkatan Produk Domestik Regional Bruto Non Migas antara lain:

- a. meningkatkan kinerja pada sektor pertanian dan kelautan untuk memberikan hasil produksi yang dapat dipasarkan baik pada pasar lokal maupun pasar diluar daerah Kota Balikpapan;
- b. meningkatkan kinerja pada sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor ekonomi lainnya guna memberikan sumber pendapatan yang terus dapat meningkat tiap tahunnya;
- c. mempercepat pengembangan kawasan industri kariatangau dan melakukan promosi untuk menarik investor menanamkan modalnya di Kota Balikpapan. Selain itu melakukan pemberdayaan bagi UMKM untuk memberikan dukungannya dalam pembangunan industri kecil dan menengah.

15. Opini Laporan Keuangan (OLK)

Target IKU Opini Laporan Keuangan adalah dengan kategori “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai dengan kategori “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Opini Laporan Keuangan antara target dan realisasi sebesar 100%. Sejalan dengan capaian kinerja IKU Opini Laporan Keuangan diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2018.

Tercapainya IKU Opini Laporan Keuangan dengan Kategori WTP merupakan komitmen Pemerintah Kota dan instansi terkait dalam membangun reformasi birokrasi secara baik dan melaksanakan tata kelola akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel, wajar, dan transparan sebagai dasar pengungkit Opini BPK dengan kategori WTP.

16. Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Target IKU Indeks Persepsi Korupsi adalah 6,70 sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai 6,87. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Indeks Persepsi Korupsi antara target dan realisasi sebesar 102,54%. Sejalan dengan capaian kinerja IKU Indeks Persepsi Korupsi diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2018. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik di bawah ini.

Capaian IKU Indeks Persepsi Korupsi sebesar 102,54% menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal yang telah diupayakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai berikut:

- a. pada tahun 2017, Pemerintah Kota Balikpapan telah membangun media aplikasi perencanaan pembangunan daerah atau yang lebih dikenal dengan e- planning;
- b. pada tahun yang sama dibangun pula aplikasi e-database untuk memberikan dukungan dalam merumuskan perencanaan pembangunan melalui data spasial;
- c. pada tahun 2018, untuk meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja perencanaan Pemerintah Kota Balikpapan membangun e-Monev;
- d. pada tahun 2018, Pemerintah Kota Balikpapan, melaksanakan perencanaan menggunakan aplikasi e-planning dengan nama SIPP (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan);
- e. Pemerintah Kota Balikpapan telah memperoleh penghargaan kinerja tata kelola keuangan dari BPK selama 4 tahun berturut-turut (tahun 2014-tahun 2017) kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

17. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Target IKU Survei Kepuasan Masyarakat adalah 79,76 sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai 78,78. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Survei Kepuasan Masyarakat antara target dan realisasi sebesar 98,91%. Sejalan dengan capaian kinerja IKU Survei Kepuasan Masyarakat diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” di Kota Balikpapan dinyatakan “TIDAK TERCAPAI” pada tahun 2018.

Permasalahan tidak tercapainya indikator Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2018 adanya peningkatan nilai mutu layanan didasarkan atas Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 dan kondisi layanan fasilitas umum yang kurang memadai dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat layanan yang dinilai masih kurang yaitu layanan pariwisata pada UPTD Pengelola Kawasan pantai Manggar Segara Sari, layanan Puskesmas, dan layanan pasar.

18. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)

Target IKU Evaluasi AKIP adalah 68,00 dengan predikat B sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai 68,13 dengan predikat B. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Evaluasi AKIP antara target dan realisasi sebesar 102,93%. Sejalan dengan capaian kinerja IKU Evaluasi AKIP diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2018.

Capaian IKU Evaluasi AKIP sebesar 102,93% menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil untuk mengimplementasikan rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal yang telah diupayakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan penyusunan sasaran strategis dan indikator kinerja RPJMD periode 2016-2021;
- b. melakukan penyempurnaan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan juga Perjanjian Kinerja, untuk memastikan kualitas indikator yang ditetapkan tetap terjaga, dengan memperhatikan kriteria indikator yang baik atau spesifik, relevan, terukur dan cukup;
- c. melakukan penetapan kinerja dapat dibuat sampai ke level Eselon III dan IV (sudah ditindaklanjuti dengan melakukan reviu atas IKU Kota pada tahun 2018);
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penetapan kinerja yang sudah disepakati dan ditandatangani, serta pemantauan terhadap rencana aksi untuk mencapai PK tersebut (akan untuk RPJMD periode 2016-2021);
- e. melaksanakan bimtek Aplikasi SILAKIP yang dibangun Pemerintah Kota Bandung bersama seluruh perangkat daerah;
- f. memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

19. **Penilaian Kepatuhan**

Target IKU Penilaian Kepatuhan adalah 65 (zona kuning) sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai 83,19 (zona hijau). Berdasarkan penilaian Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kota Balikpapan pada tahun 2017. Karena sudah berada pada zona hijau, maka ORI tidak melakukan penilaian lagi. Oleh sebab itu, capaian Penilaian Kepatuhan pada tahun 2018 dianggap sama dengan tahun 2017.

Penilaian Kepatuhan didasarkan oleh hasil evaluasi pelayanan publik, untuk kriteria nilai kepatuhan dibagi dalam 3 (tiga) zonasi pewarnaan yaitu warna hijau (Kepatuhan Tinggi), warna kuning (Kepatuhan Sedang) dan warna merah (Kepatuhan Rendah). Terkait dengan nilai capaian IKU Penilaian Kepatuhan sebesar 83,19 diartikan bahwa dari hasil evaluasi pelayanan publik oleh ombudsmen RI untuk 10 (sepuluh) perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dinyatakan masuk dalam kriteria zonasi warna hijau didasarkan atas nilai capaian rata-rata hitung terhadap layanan yang diberikan oleh perangkat daerah.

Upaya dan tindak lanjut terhadap capaian kinerja dari Penilaian Kepatuhan tersebut adalah:

- a. meningkatkan layanan publik yang prima sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan pada perangkat daerah;

- b. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap sejumlah layanan publik di tiap-tiap perangkat daerah yang dinilai oleh masyarakat masih kurang dalam pelayanan serta adanya unsure gratifikasi dari layanan yang diberikan;
- c. mengembangkan rencana aksi yang memberikan dukungan dan nilai tambah terhadap layanan publik.

20. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Target IKU Indeks Profesionalitas ASN adalah 83 sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai 92,58 berdasarkan metode perhitungan lama oleh BKPSDM. Jika dihitung dengan menggunakan metode baru, maka nilai capaiannya hanya 59,19. Perbedaan metode ini memberikan perbedaan hasil capaian yang sangat signifikan. Berikut adalah beberapa perbedaan metode perhitungan tersebut:

- a. metode menggunakan sistem sampling sebanyak 10 SKPD, sedangkan metode baru tidak menggunakan sistem sampling, tapi seluruh SKPD (36 SKPD);
- b. metode lama tidak memperhitungkan jumlah ASN yang tingkat pendidikan (SD/SMP/SMA/S1 dan S2) dalam setiap SKPD, sedangkan metode baru memperhitungkan jumlah/proporsi ASN dengan tingkat pendidikan tertentu;
- c. metode lama tidak memperhitungkan keselarasan job description dengan latar belakang pendidikan ASN per SKPD, sedangkan metode baru memperhitungkannya, dan seterusnya.

Dengan memperhatikan konsistensi kronologis data untuk memudahkan perbandingan capaian tahun 2017 dan 2018, maka untuk sementara pembahasan capaian kinerja terhadap target diputuskan masih menggunakan data hasil perhitungan metode lama, namun data hasil perhitungan dengan metode baru tetap disajikan.

Indeks Profesionalitas ASN merupakan indikator untuk mengukur tingkat profesionalitas pegawai ASN yang diperoleh dari jumlah nilai SKP ditambah dengan selisih rata-rata gaji dan tunjangan kinerja dan jumlah pelanggan disiplin dalam melaksanakan tugasnya. Terkait dengan angka capaian realisasi Indeks Profesionalitas ASN sebesar 92,58 menggambarkan bahwa tingkat profesionalitas ASN di Kota Balikpapan memiliki predikat yang baik dalam melaksanakan dan mengemban tugas yang diberikan berdasarkan tugas dan fungsinya pada tiap perangkat daerah. Sehubungan hal tersebut capaian kinerja indikator terhadap target sebesar 110,21% artinya kinerja atas indikator profesionalitas mengalami peningkatan dan melampaui dari target PK Wali Kota Balikpapan pada tahun 2018.

Upaya dan tindak lanjut terhadap capaian kinerja dari tingkat profesionalitas ASN adalah:

- a. meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan secara berkelanjutan;
- b. memberikan reward atas pencapaian kinerja profesionalitas ASN;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian secara komprehensif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi ASN disetiap perangkat daerah guna menjamin terbentuknya ASN yang lebih professional dalam menjalankan tugas dan pelayanan bagi masyarakat.